



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Fahri Ingatkan KPK : Jangan Ada Kesan Novanto Dikejar, RJ Lino Dibiarin  
**Tanggal** : Jumat, 24 November 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 1 & 9

### FAHRI INGATKAN KPK

## Jangan Ada Kesan Novanto Dikejar, RJ Lino Dibiarin

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah belum habis ide membuat Setya Novanto, Kali ini, Fahri membandingkan kasus Ketua DPR itu dengan Direktur Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino yang sudah

dua tahun jadi tersangka tapi tidak ditahan. Menurut Fahri, jangan sampai ada kesan Novanto dikejar, tapi Lino malah dibiarin.

Hal ini diutarakan Fahri di gedung

DPR, Senayan, kemarin. "Kenapa Setya Novanto diburu sampai malam-malam dikejar-kejar, kerahkan Brimob dan polisi," ujar Fahri.

KPK memang bersemangat mengejar

Novanto. Penyidik maksimal mendatangi Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta begitu dikabarkan Novanto

◆ BERSAMBUNG KE HAL 9

## Fahri Nggak Pengan Citra DPR Turun Banyak

### Jangan Ada

... DARI HALAMAN 1

dirawat di sana usai kecelakaan lalu lintas, 16 November lalu.

Novanto pun akhirnya dipindahkan ke RSCM esok harinya. Tidak sampai dua hari Novanto bermalam di RSCM, KPK sigap membawa tersangka e-KTP itu ke rutan KPK. Novanto, dianggap mampu secara fisik menjalani pemeriksaan.

Nah, kesigapan KPK menindak Novanto itu dianggap Fahri kalau ketuanya itu memang sedari awal diburu oleh KPK. Pasalnya, kata Fahri, ada perbedaan penanganan kasus Pelindo II dengan kasus e-KTP. Dia mempertanyakan kenapa RJ Lino tidak ditahan padahal sudah dua tahun menjadi tersangka.

Fahri menyebut soal kerugian negara kasus Pelindo II juga terbilang besar, yakni Rp 4,08 triliun. Sementara e-KTP dianggap negara rugi Rp 2,3 miliar.

Fahri menduga, adanya permainan politis yang dilakukan KPK. Padahal RJ Lino sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus itu, tapi kenyataanya tidak juga ditahan. "Jadi saya bisa katakan penegakan hukum KPK itu penuh fitnah," tudingnya.

Dengan analogi tersebut, Fahri meminta agar Novanto juga dibebaskan dari penahanan KPK serupa dengan RJ Lino. Jika fair, kata Fahri, maka lembaga antirasuah tersebut tidak perlu melakukan penahanan terhadap Novanto. "Harusnya diperlakukan

sama seperti RJ Lino. Agar citra DPR enggak turun bebasan kayak RJ Lino," harapnya.

Selain itu, Fahri juga menyampaikan, meski saat ini Novanto menjadi tahanan KPK, jabatan kursi Ketua DPR RI tidak mengalami kekosongan. Maka dengan demikian, kata Fahri, saat ini belum perlu dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI menggantikan Novanto.

Tidak hanya itu, Fahri juga mengatakan, bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa menonaktifkan Novanto. Dia berdasarkan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3), seseorang baru bisa dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPR bila sudah berstatus terdakwa.

Sebagai pembanding, dalam kasus dugaan korupsi quay container crane (QCC), KPK menduga crane yang diangkatkan RJ Lino melalui PT Wuxi Huadong Heavy Machinery Ltd tidak sesuai spesifikasi.

Dalam proses lelang perusahaan penggarap proyek juga dianggap terjadi kejanggalan. KPK menduga Lino menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok itu sebagai penggarap proyek miliaran rupiah ini.

Namun pasca ditetapkan sebagai tersangka pada 2015, KPK tak kunjung menahan RJ Lino. KPK mengklaim masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. KPK juga menyatakan penyelesaian kasus RJ Lino bukan soal

adu cepat dengan Polri.

Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menyebut pihaknya masih menelusuri dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat RJ Lino. Walau belum ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri menegaskan penyidikan jalan terus.

Bareskrim, sudah menetapkan 2 tersangka yakni Feriady Noerlan selaku Direktur Teknik dan Harryadi Budi Kunoro sebagai Manager Peralatan. Keduanya telah divonis oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan pidana kurungan selama 1 tahun 4 bulan.

Sementara KPK yang lebih dulu menanggalkan RJ Lino pada 18 November 2015, masih belum bisa merampungkan berkas penyidikan.

Lino diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan 10 unit mobile crane yang mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 37 miliar.

"Saya kira ini bukan soal mendahului atau tidak. Iri soal mengumpulkan barang bukti sekutu-kuatnya dalam proses hukum. Lagipula objek maupun ruang lingkup yang kita tangani itu berbeda antara KPK dengan Polri. Jadi yang bisa dilakukan adalah saling mendukung penanganan perkara ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (1/11) lalu.

Menanggapi ini, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane menyatakan sudah saatnya KPK-Polri

membuktikan kemampuannya untuk menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan mantan Dirut Pelindo II RJ Lino.

Dalam catatan IPW, RJ Lino terlibat dua kasus, kasus yang ditangani Bareskrim Polri dan ditangani KPK. Di KPK, RJ Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua tahun lalu. RJ Lino jadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane Tahun 2010.

"Namun anehnya, kasusnya mengendap hingga kini. Baik Bareskrim maupun KPK seperti menyimpan kasus Lino di dalam peti es. Seakan tak tersentuh. Sepertinya KPK lebih berani kepada Ketua DPR Setya Novanto ketimbang RJ Lino," ujar Neta kepada Rakyat Merdeka.

Terbukti, katanya, belum lama menjadi tersangka Novanto sudah diburu dan kemudian ditahan. Sebaliknya RJ Lino meski sudah dua tahun jadi tersangka, seakan KPK tidak berani menyentuhnya, apalagi menahannya seperti Novanto. Tampaknya Lino lebih kuat dari Novanto. Pasalnya, walau punya dua kasus, di KPK dan Bareskrim, tapi Lino tetap aman aman saja.

"Sikap tegas KPK terhadap Novanto ini harus ditunjukkan kepada RJ Lino. Sehingga KPK tidak ditutup tebang pilih dalam menangani kasus kasus korupsi. KPK harus membuktikan bahwa Lino tidak kebal hukum dan kasusnya harus segera dilanjutkan," pungkasnya. ■ BSH